

81 Tahun Menanti, Gubsu Bobby Tegaskan Komitmen Tuntaskan Pembangunan Jalan Sipiongot

Medan, MIMBAR – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di Sipiongot, bukan sekadar janji politik, melainkan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setelah puluhan tahun menanti, masyarakat Dolok Sipiongot dan

■ Bersambung ke Hal 11



Putusan MK: Kepala Daerah Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Jakarta, MIMBAR - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Putusan ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo di sidang pengucapan putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, di MK, Jakarta, Senin



■ Bersambung ke Hal 11

Nadiem Makarim DIVONIS 10 Tahun Penjara

Jakarta, MIMBAR - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM)

■ Bersambung ke Hal 11

Kejagung Diminta Usut Rp4,8 Triliun Kasus Nadiem Pakai TPPU

MAJELIS hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa untuk membebaskan pembayaran uang pengganti sekitar Rp4,8 triliun dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM)

■ Bersambung ke Hal 11

Nadiem Bakal Banding

MANTAN Mendikbudristek Nadiem Makarim akan mengajukan banding usai divonis 10 tahun penjara dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022.

"Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya dan keluarga saya,

■ Bersambung ke Hal 11



Kasus Kuota Haji Eks Menpora Diperiksa KPK

Jakarta, MIMBAR - Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengaku dicecar pertanyaan mengenai dua tersangka baru dari pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

■ Bersambung ke Hal 11



Mendagri Dukung Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos

Jakarta, MIMBAR - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan atau government technology (GovTech). Percepatan ini menurutnya upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern melalui layanan publik berbasis digital.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal
Salat

15 MUHARRAM 1448 H

Imsak	: 04:47 WIB	Ashar	: 15:58 WIB
Subuh	: 04:57 WIB	Maghrib	: 18:41 WIB
Zuhur	: 12:31 WIB	Isya	: 19:56 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Rayap Besi Meresahkan

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Belakangan ini, keresahan warga Kota Medan terhadap maraknya pencurian besi penutup drainase, pagar pembatas jalan, hingga berbagai fasilitas umum berbahan logam semakin meningkat. Fenomena yang oleh masyarakat kerap disebut sebagai ulah "rayap besi" tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keselamatan publik dan kualitas pelayanan perkotaan.

Istilah "rayap besi" merujuk pada pelaku pencurian berbagai



■ Bersambung ke Hal 11

Kemhan Akhirnya Setop Latsarmil Kopdes Merah Putih Diubah Jadi Latihan Bela Negara dan Manajerial

KEMENTERIAN Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Selanjutnya, program pelatihan akan diberikan dengan sistem, materi pembelajaran dan nama baru.

"Kemhan melakukan penyesuaian pendeka-

■ Bersambung ke Hal 11



KORAN
MIMBAR
UMUM

HARGA BARU

BERLANGGANAN KORAN

1 BULAN	= Rp. 20.000
12 BULAN	= Rp. 120.000

TERSEDIA DI
myedisi
reader

BISA DOWNLOAD APLIKASI DI
Google Play
App Store



■ Antara ngerih, perih, dan sedih
■ ckeckck ...

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara

Dari Halaman 1

tahun anggaran 2020-2022.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp1 miliar," ujar ketua majelis hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6).

Menyatakan Nadiem Makarim bersalah melakukan tindak pidana dakwaan subsidier

Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp809,5 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan

pidana 5 tahun penjara.

Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Hal memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi hingga perbuatan dilakukan secara sistematis.

Sedangkan hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dilakukan pidana sebelumnya.

Salah satu anggota majelis hakim Andi Saputra memiliki pendapat berbeda dalam vonis ini alias dissenting opinion. Andi menilai dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya dibe-

baskan dari segala dakwaan kasus Chrome-book.

Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung yang ingin Nadiem dihukum dengan pidana 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier 190 hari pidana penjara.

Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp809.597.125.000 (Rp809,5 miliar) dan Rp4.871.469.603.758 (Rp4,8 triliun)- yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi.**(cnni/js)**

Eks Menpora

Dari Halaman 1

Ia menyampaikan itu usai rampung menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus ini.

"Tadi ini pemeriksaan buat sprindik yang baru. Kan kemarin saya pertama ke sini untuk sprindik yang tersangka pertama Gus Yaqut sama Gus Alex. Ini yang kedua swasta. Ya keterangan tambah-tambah informasi," kata Dito di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6).

Dito mengatakan materi pemeriksaan hari ini juga tak jauh berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya pada 23 Januari lalu.

Ia menyebut masih dicecar ihwal alur pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi ke Indonesia.

"Lebih karena waktu itu kan saya ada dalam lokasi di Arab Saudi pas pertemuan dengan MBS. Kan kebetulan mertua juga terkait dengan asosiasi. Jadi lebih digali ke situ," ujar dia.

Pada Selasa (30/6) hari ini, Dito kembali diperiksa KPK. Ia tiba di gedung KPK pada pukul 10.05 WIB.

Pemeriksaan hari ini bukan yang pertama. Pada 23 Januari lalu, Dito diperiksa KPK di kasus serupa. Saat itu ia diperiksa selama 3 jam oleh penyidik..**(cnni/js)**

Mendagri Dukung

Dari Halaman 1

Dalam keterangan tertulis Kemendagri, salah satu langkah yang tengah dilakukan pemerintah ialah pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (30/6).

"Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-governent," kata Tito.

Tito mengatakan program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan menunjukkan hasil baik. Keberhasilan tersebut kini diperluas ke 43 kabupaten/kota sebagai bagian dari implementasi nasional. **(cnni/js)**



Rayap Besi Meresahkan

Dari Halaman 1

material logam milik negara maupun masyarakat untuk kemudian dijual ke penadah sebagai barang rongsokan. Di berbagai sudut Kota Medan, tidak sulit menemukan drainase tanpa penutup, pagar pembatas jalan yang hilang sebagian, hingga tutup manhole yang raib tanpa jejak. Kondisi ini tentu sangat membahayakan, terutama bagi pengguna jalan, pengendara sepeda motor, pejalan kaki, serta anak-anak.

Banyak warga mengeluhkan keberadaan lubang drainase terbuka yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat tidak melihat adanya lubang di tengah jalan, khususnya pada malam hari atau saat hujan deras. Dalam kondisi tertentu, lubang drainase yang terbuka juga dapat menyebabkan genangan air karena sampah mudah masuk dan menyumbat saluran. Dengan demikian, dampak pencurian besi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa.

Persoalan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan. Sebagian pelaku pencurian mengaku terdorong oleh kebutuhan ekonomi. Namun, alasan ekonomi tentu tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan melanggar hukum yang merugikan masyarakat luas. Di sisi lain, praktik penadahan barang curian masih menjadi mata rantai utama yang memungkinkan kejahatan ini terus berlangsung. Selama masih ada pihak yang bersedia membeli besi curian, maka pencurian serupa akan terus terjadi.

Penegakan hukum tidak boleh hanya menasar pelaku lapangan. Aparat penegak hukum harus berani menindak tegas para penadah dan pelaku usaha rongsokan yang terbukti menerima barang hasil kejahatan. Penadah merupakan bagian penting dari jaringan kejahatan tersebut. Tanpa pasar, pencuri tidak memiliki insentif untuk terus beraksi.

Selain penegakan hukum, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengamanan fasilitas publik. Penggunaan teknologi pengawasan seperti kamera CCTV di titik-titik rawan, patroli rutin, serta penggantian material tertentu dengan bahan yang kurang memiliki nilai jual dapat menjadi alternatif. Di sejumlah daerah, penggunaan bahan komposit sebagai pengganti besi terbukti mampu menekan angka pencurian.

Persoalan "rayap besi" sejatinya juga berkaitan dengan kesadaran sosial masyarakat. Fasilitas umum dibangun menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Ketika seseorang mencuri fasilitas publik, sesungguhnya ia sedang merugikan seluruh warga. Oleh sebab itu, masyarakat perlu menumbuhkan rasa memiliki terhadap aset bersama. Partisipasi warga dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar juga sangat diperlukan.

Dalam perspektif moral dan agama, tindakan mencuri merupakan perbuatan tercela yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak tatanan sosial. Islam secara tegas melarang segala bentuk pengambilan hak orang lain secara batil. Mencuri fasilitas umum bahkan memiliki dampak yang lebih luas karena menyangkut kepentingan banyak orang.

Kota Medan sebagai kota metropolitan membutuhkan fasilitas publik yang aman, nyaman, dan terawat. Keberadaan "rayap besi" tidak boleh dibiarkan menjadi penyakit kronis perkotaan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memutus mata rantai kejahatan ini. Jika tidak segera ditangani secara serius, bukan hanya aset negara yang hilang, tetapi juga rasa aman masyarakat yang ikut terkikis.

Nadiem Bakal Banding

Dari Halaman 1

dem Indonesia yang masih saya cintai, saya akan segera melaksananak naik banding untuk berjuang demi kebenaran," kata Nadiem usai vonis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

Nadiem mengatakan, vonis itu tidak masuk

akal karena hakim menurutnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.

"Saya divonis 10 tahun, plus 5 tahun jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal," ujarnya

Nadiem juga menyinggung hukuman uang pengganti senilai Rp809 miliar. Ia mengatakan tidak memiliki harta sebanyak itu dalam bentuk

apapun.

"Saya divonis 15 tahun karena saya dituntut uang pengganti Rp809 miliar yang saya tidak punya, mereka tahu itu dari hasil laporan kekayaan saya di akhir menjabat. Saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Rp809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun," katanya.**(cnni/js)**

81 Tahun Menanti, Gubsu Bobby Tegaskan

Dari Halaman 1

sekitarnya kini mulai merasakan terwujudnya pembangunan jalan yang layak.

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pengajian dan silaturahmi Ikatan Keluarga Dolok Sipiongot dan Sekitarnya (IKDS) di Jalan Menteng Indah, Medan Denai, Minggu (28/6/2026). Kegiatan itu juga menjadi momentum bagi warga IKDS menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dimulainya pembangunan infrastruktur di kampung halaman mereka.

"Ini merupakan kewajiban kami sebagai pemerintah. Kami sepakat hari ini dari Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan DPRD, kalau mau membangun suatu daerah jangan sepenggal-sepenggal. Kebutuhannya minimal 40% dari total kerusakan jalan harus diselesaikan secara tuntas dalam satu anggaran, dan harus ada jalur alternatif pengerjaan agar kualitasnya terjaga," tegas Bobby.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga membagikan pengalaman emosionalnya saat pertama kali meninjau langsung kondisi jalan di Sipiongot. Ia mengenang perjalanan menuju sebuah desa terpencil yang ditempuh hingga

pukul dua dini hari melalui jalan rusak di tengah hutan. Setibanya di lokasi, ia disambut hangat warga lanjut usia yang masih terjaga sambil menabuh rebana sebagai bentuk penghormatan kepada kepala daerah yang datang mengunjungi mereka.

"Melihat kondisi masyarakat secara langsung di lapangan saat itu membuat saya meneteskan air mata. Sejak itu saya bertekad, selama masa jabatan saya, janji pembangunan ini harus ditepati karena dampaknya akan dirasakan selamanya oleh masyarakat," ungkapnya.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Bobby menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumut meningkatkan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara signifikan. Jika pada tahun sebelumnya anggaran untuk sektor jalan dan sungai sekitar Rp500 miliar, maka pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp1,9 triliun khusus untuk pembangunan jalan.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby Nasution juga menerima prosesi adat upah-upah sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa keselamatan dari para tokoh masyarakat.

Sementara itu, Penasihat IKDS Ihwan Ritonga menyampaikan apresiasi atas perhatian

Pemerintah Provinsi Sumut terhadap pembangunan di Sipiongot. Menurutnya, berdasarkan catatan para tokoh masyarakat, wilayah tersebut belum pernah menikmati pembangunan infrastruktur secara menyeluruh sejak Indonesia merdeka.

"Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, baru di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Bobby Nasution daerah kami tersentuh pembangunan secara total. Dulu anggaran hanya masuk untuk 2 kilometer, tapi sekarang tiga ruas jalan utama di wilayah Dolok, Sipiongot, hingga Huta Baru sedang berproses dibangun," ujar Ihwan Ritonga.

Di akhir acara, para kepala desa yang datang langsung dari Sipiongot ke Kota Medan juga menitipkan harapan agar pembangunan jalan dapat dilanjutkan hingga menjangkau 17 desa lainnya di kawasan perbatasan, termasuk wilayah yang berbatasan dengan Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Rantauprapat, dan Tapanuli Selatan.

Turut hadir pada kegiatan tersebut para pimpinan perangkat daerah Provinsi Sumut, Ketua Umum IKDS, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Dolok Sipiongot KH Abdul Efendi, para tokoh adat Raja, serta ratusan warga dan ibu-ibu pengajian IKDS.**(A-05)**

Putusan MK: Kepala Daerah Tetap Dipilih

Dari Halaman 1

(29/6). MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tidak dapat diterima.

"Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa," kata Suhartoyo.

MK dalam pertimbangannya menilai pemohon dalam permohonan 195/PUU-XXIV/2026 tidak menemukan apa yang disampaikan pemohon terkait hal yang bisa merugikan hak konstitusional secara aktual atau pun potensial, yang dapat terjadi dalam batas penalaran wajar.

Diubah Jadi Latihan Bela Negara dan Manajerial

Dari Halaman 1

tan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan Latsarmil lagi," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Siraat saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/6).

Perubahan itu dilakukan setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi sistem pembelajaran usai kejadian lima peserta latsarmil meninggal dunia.

Dengan evaluasi ini, Rico memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi.

"Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini," kata Rico.

"Fokus kegiatan diarahkan pada pamben-

tukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi," ujar dia.

Menurut Rico, Kemhan juga akan memperhatikan kondisi kesehatan peserta demi memastikan proses pendidikan para calon pengelola koperasi bisa berjalan aman dan tertib.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Merah Putih.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6).

Menurut Ketut, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh perlu dilakukan untuk

mengetahui kondisi fisik para peserta.

Setelah kondisi kesehatan para peserta diketahui, setiap satuan TNI yang jadi pihak pelatih latsarmil harus menyesuaikan porsi latihan fisik sesuai dengan kondisi para peserta.

Dari sisi penanganan, Kemhan juga meminta agar penanganan medis terhadap peserta yang sakit bisa dilakukan secara cepat dan maksimal.

Tidak hanya evaluasi soal kesehatan saja, Ketut mengatakan Sjafrie meminta evaluasi juga harus dilakukan dari segi pemberian materi selama pendidikan.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," kata dia.

Dengan demikian, para peserta tidak akan kehilangan esensi dari pendidikan latsarmil yang lebih menekankan pada nilai kedisiplinan dan membangun jiwa kepemimpinan.**(cnni/js)**